

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemiskinan dan ketimpangan gender sudah menjadi isu yang biasa dan sangat kompleks bagi negara-negara di dunia terutama yang sedang berkembang, termasuk Indonesia. Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, papan, serta kesehatan dan pendidikan tidak dapat terpenuhi. Sedangkan ketimpangan gender merupakan sebuah kondisi dimana terdapat perlakuan yang tidak adil atau setara antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan yang diakibatkan oleh sistem dan struktur sosial. Berdasarkan data dari PBB, sepertiga dari penduduk dunia di bawah garis kemiskinan, dan dari 70% di antara angka tersebut merupakan perempuan. Selain itu, di dalam buku yang berjudul *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* oleh Todaro (2000) dijelaskan pula bahwa standar hidup dengan penduduk paling miskin adalah perempuan dan anak-anak. Mereka menjadi korban utama dari adanya kemiskinan. Menurut laporan *Fulfilling The Beijing Commitment* (2000), alasan posisi yang tidak menguntungkan bagi perempuan di negara-negara berkembang antara lain karena pertama, perempuan memiliki akses yang sangat terbatas dalam aset domestik seperti hak atas tanah dan bangunan. Alasan kedua, perempuan dibatasi dalam pasar kredit dikarenakan diskriminasi gender dimana suami atau laki-laki cenderung lebih mudah untuk mendapatkan bantuan kredit daripada perempuan. Ketiga, pasar asuransi pada negara berkembang tidak berjalan secara maksimal. Keempat, perempuan diberi akses yang rendah dalam dunia pekerjaan serta pendapatannya lebih rendah daripada laki-laki (Keppi, 2015).

Table 1. Presentase Rumah Tangga Miskin menurut Jenis Kepala Rumah Tangga, Maret 2023

Status Kemiskinan	Pasangan Lengkap	Single Parent Laki-Laki	Single Parent Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tidak Miskin	94,08	92,13	87,22	92,47
Miskin	5,92	7,87	12,78	7,53
Total	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber; 1. BPS, Susenas 2023 (diolah)

Dengan menggunakan data Susenas bulan Maret 2023, terlihat bahwa kelompok rumah tangga *single parent* baik yang dipimpin oleh laki-laki maupun perempuan memiliki kecenderungan mengalami kemiskinan lebih besar daripada kelompok rumah tangga dengan pasangan lengkap. Namun yang menjadi sorotan adalah hasil olah data sederhana ini juga

menunjukkan bahwa di Indonesia, rumah tangga *single parent* yang dipimpin oleh perempuan memiliki kerentanan akan kemiskinan yang tinggi, lebih tinggi daripada *single parent* laki-laki. Hal ini dikarenakan oleh rata-rata pendapatan perempuan yang lebih rendah daripada laki-laki yang merujuk pada masalah ketimpangan gender di Indonesia tersebut.

Di Indonesia, kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan menjadi satu dari sekian masalah dan tantangan pokok dalam pembangunan. Kualitas hidup perempuan masih sangat rendah menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Tingkat diskriminasi perempuan masih tinggi di beberapa wilayah di Indonesia, juga status dan peran perempuan dalam pembangunan masih sangat terbatas. Bali menjadi salah satu wilayah dengan angka pembangunan gender terendah di Indonesia. Maka dari itu, kesejahteraan dan kualitas hidup perempuan menjadi sangat penting untuk dikaji. Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui program-program pemberdayaan perempuan. Hal ini dapat dilakukan dengan kerjasama pembangunan.

Pada periode dua tahun sebelum pandemi Covid-19, IKG Indonesia tercatat sebesar 0,49 pada tahun 2018 dan sebesar 0,488 pada tahun 2019. Indikator pembentuk Indeks Ketimpangan Gender yaitu kesehatan, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja.

Table 2. Perkembangan Indikator-Indikator IKG Indonesia, 2018-2022

<b>Dimensi Indikator</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Kesehatan Reproduksi</b>						
MTF	Perempuan	0,214	0,181	0,163	0,154	0,140
MHPK 20	Perempuan	0,214	0,271	0,263	0,262	0,265
<b>Pemberdayaan</b>						
Keterwakilan di Legislatif (%)	Laki-laki	82,68	79,48	78,91	78,11	78,26
	Perempuan	17,32	20,52	21,09	21,89	21,74
Pendidikan SMA ke atas (%)	Laki-laki	38,27	39,77	41,63	41,30	42,06
	Perempuan	30,99	31,85	34,63	34,87	36,95
<b>Pasar Tenaga Kerja</b>						
TPAK (%)	Laki-laki	82,80	83,25	82,41	82,27	83,87
	Perempuan	51,80	51,81	53,13	53,34	53,41

Sumber; 2. BPS (2023)

Tabel diatas menunjukkan dengan sangat jelas bahwa angka IKG dalam kesehatan reproduksi, pemberdayaan, maupun pasar tenaga kerja milik perempuan lebih rendah daripada

laki-laki. Melalui penguatan kesetaraan gender, masyarakat dapat memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki manusia dan menciptakan pembangunan manusia yang berkelanjutan serta inklusif.

Hubungan antara Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dan ketiga indikator lainnya, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), seharusnya bersifat berlawanan. Dalam konteks ini, IKG yang rendah idealnya didukung oleh tingginya angka IPM, IPG, dan IDG. Sebaliknya, IKG yang tinggi mencerminkan rendahnya nilai-nilai dari ketiga indikator tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi nilai IPM, semakin rendah nilai IKG yang seharusnya tercapai. Hal ini juga berlaku untuk IPG dan IDG. Misalnya, jika suatu wilayah memiliki IPM yang tinggi, yang menunjukkan tingkat pembangunan manusia yang baik, maka IKG di wilayah tersebut seharusnya rendah, mengindikasikan kesetaraan gender yang lebih baik. Demikian juga, jika IPG yang mengukur pencapaian pembangunan berdasarkan kesetaraan gender menunjukkan angka yang tinggi, dan IDG yang mencerminkan ketidaksetaraan gender menunjukkan angka yang tinggi pula, maka seharusnya IKG di wilayah tersebut menjadi rendah. Oleh karena itu, hubungan antara IKG dan ketiga indikator ini bersifat invers, di mana peningkatan pada IPM, IPG, dan IDG seharusnya berkontribusi pada penurunan nilai IKG, menandakan adanya kemajuan dalam kesetaraan gender dan pembangunan manusia.

Australia merupakan salah satu negara yang turut mensponsori resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai isu-isu perempuan. Pemerintah Australia telah bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia sejak tahun 2006 sebagai upaya dalam membantu menghapus kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat (Kemenpppa, 2023). Maka dari itu, pemerintah Australia turut berkomitmen pada pemerintah Indonesia untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Salah satunya dengan mendirikan program-program kemitraan untuk memberdayakan perempuan miskin di Indonesia. Kemitraan tersebut berkontribusi pada beberapa prioritas dan target pemerintah Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana kerjasama pembangunan Australia dan Indonesia dalam ranah kesetaraan

gender?

### **C. Kerangka Konseptual**

#### **1. Teori Politik Luar Negeri**

Politik luar negeri yaitu suatu cara yang sering digunakan dalam sebuah interaksi negara dengan tidak mengungkapkan sifat kebijakan yang sebenarnya. Politik luar negeri juga dapat diartikan sebagai keputusan yang bersifat administratif yang dibentuk oleh anggota-anggota birokrasi pemerintah dengan tugas melaksanakan luar negeri negaranya. Kebijakan yang terdapat di dalam White Paper mengusung kepentingan nasional dengan memajukan kemakmuran Australia, kemandirian pengambilan keputusan, keamanan, keselamatan, dan kebebasan rakyat. Dalam White Paper diidentifikasi lima tujuan mendasar pentingnya keamanan dan kemakmuran Australia. Di bawah ini merupakan usaha-usaha yang akan dilakukan oleh pemerintah:

1. mempromosikan sistem yang terbuka, inklusif dan menciptakan kawasan Indo-Pasifik yang makmur dimana hak semua negara akan dihormati,
2. memberikan lebih banyak peluang bagi pelaku bisnis secara global dan menentang proteksionisme,
3. memastikan warga Australia tetap aman dan bebas dalam menghadapi ancaman seperti terorisme,
4. mempromosikan dan melindungi aturan internasional yang mendukung stabilitas dan kemakmuran sehingga memungkinkan kerja sama untuk mengatasi tantangan global,
5. meningkatkan dukungan untuk negara Pasifik dan Timor-Leste yang lebih tangguh.

Kerjasama antara Australia dan Indonesia dalam bidang pembangunan dapat dikaji menggunakan teori politik luar negeri. Australia sebagai negara donor Indonesia memiliki politik luar negeri yang salah satu fokusnya yaitu menjaga kestabilan dan kemakmuran kawasan Indo-Pasifik. Kebijakan luar negeri dibuat dengan prinsip mencapai Indo-Pasifik yang stabil dan makmur. Indo-Pasifik mencakup sebagian besar wilayah mitra ekonomi paling penting dan kedinamisannya mendukung pertumbuhan ekonomi di Australia, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan standar kehidupan. Titik awalnya adalah menentukan Indo Pasifik seperti apa yang diinginkan. Menetapkan visi untuk lingkungan yaitu ketaatan pada aturan yang mana akan

memberikan perdamaian yang langgeng, dimana hak-hak semua negara dihormati, dan di mana pasar terbuka memfasilitasi arus bebas perdagangan, modal dan ide.

Selain itu, kesetaraan gender diposisikan sebagai nilai inti dari identitas dan pendorong teori politik luar negeri Australia. Meningkatnya fokus pada partisipasi perempuan dalam perdamaian dan keamanan semakin memungkinkan norma-norma pro-gender berkembang di beberapa bidang pertahanan dan rancangan kebijakan luar negeri Australia. Prinsip pro-gender sejalan dengan kebebasan dan demokrasi sebagai pernyataan nilai tentang bagaimana Australia membayangkan dirinya sebagai aktor kebijakan luar negeri. The Foreign Policy White Paper menyatakan “kebijakan luar negeri Australia menjadikan pemberdayaan perempuan sebagai prioritas utama” dan menyebut bahwa kesetaraan gender berjalan bersamaan dengan “kebebasan politik, ekonomi, serta kebebasan beragama, demokrasi liberal, supremasi hukum, kesetaraan ras dan gender serta saling menghormati” sebagai nilai inti nasional (Lee-Koo, 2020). Buku Putih Australia merupakan dokumen menyeluruh yang strategis yang menjadi panduan arah kebijakan. Dokumen ini dirancang untuk menguraikan tantangan, prioritas, dan peluang yang diidentifikasi oleh pemerintah pada bidang kebijakan dan menjelaskan nilai-nilai yang mendasari pemerintah melakukan pendekatannya. Dokumen kebijakan yang spesifik akan gender salah satunya yaitu Gender Equality and Women’s Empowerment Strategy 2016 (DFAT 2016). Didalamnya dikemukakan bahwa “kebijakan Australia tidak akan berhasil jika kita tidak mempertimbangkan dan mengatasi norma-norma ketidaksetaraan gender—aturan sosial dan harapan laki-laki dan perempuan.” Ini terus berlanjut sampai pada memahami hubungan gender dalam konteks operasional apapun adalah suatu keharusan untuk memahami posisi perempuan dan laki-laki dalam konteks tersebut, bagaimana mereka diuntungkan atau dirugikan, hambatan kesetaraan gender serta bagaimana cara mengatasinya. Aggestam dan Bergman Rosamond berpendapat ini merupakan langkah penting untuk repolitisasi hubungan gender-keamanan setelah depolitisasinya melalui pendekatan birokrasi terhadap pengarusutamaan gender (Lee-Koo, 2020).

Persemakmuran Australia merupakan salah satu demokrasi tertua dan lestari di dunia. Didirikan pada tahun 1901, pada saat bekas koloni Inggris ini yang kini menjadi enam negara bagian, sepakat untuk menjadi federasi. Praktik dan prinsip-prinsip demokrasi yang membentuk parlemen kolonial pra-federasi seperti ‘satu orang, satu suara’ dan hak pilih wanita diberlakukan oleh pemerintah federal Australia yang pertama. Sistem pemerintahan di Australia dibangun atas tradisi demokrasi liberalnya.

Berdasarkan nilai-nilai dalam kehidupan bernegara seperti toleransi beragama, kebebasan berserikat, berbicara, dan supremasi hukum, lembaga-lembaga serta praktik pemerintahannya mencerminkan model yang sama seperti Inggris dan Amerika Utara. Di saat yang bersamaan, model tersebut khas Australia.

Secara geografis, Australia berada di kawasan Asia Pasifik, sehingga hal ini membuat politik luar negerinya berbeda dengan negara induknya yaitu Inggris. Maka dari itu, objek utama dari politik luar negeri Australia berada di kawasan Asia Pasifik pula. Buku Putih Pertahanan tahun 2009 menjelaskan secara lebih luas kepentingan Australia yang lestari pada stabilitas kawasan Asia Pasifik. Indonesia yang berada dalam regional Asia Pasifik menjadi salah satu negara terdekat dari Australia dan menjadi salah satu negara sasaran dari politik luar negerinya.

Di Indo-Pasifik, pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan oleh globalisasi mengubah keseimbangan kekuatan. Amerika Serikat telah menjadi kekuatan terbesar pada wilayah Indo-Pasifik di sepanjang sejarah pasca Perang Dunia ke-2 Australia. Saat ini, Cina menyaingi posisi Amerika Serikat. Australia dan wilayahnya menghadapi berbagai macam ancaman keamanan, dari rudal jarak jauh dan program nuklir Korea Utara, hingga terorisme. Kerapuhan bangsa, pergantian demografi, dan tantangan lingkungan seperti perubahan iklim akan berlanjut untuk membentuk dunia dan permintaan respon kebijakan Australia. Pendorong kuat dari perubahan memusat pada cara yang membentuk kembali tata kelola internasional dan memberi tantangan akan kepentingan Australia. Dalam dekade mendatang, Australia harus menjadi kompetitif dan sigap untuk memperoleh keuntungan dalam berbagai kesempatan yang datang dari perekonomian Asia yang dinamis serta kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Semua perkembangan yang signifikan dalam proteksionisme global dapat menciptakan perselisihan, merusak perkembangan ekonomi, dan menggeser hukum yang mendukung arus perdagangan dan investasi (Government, 2017). Tentu ini merupakan hal yang dihindari oleh pemerintahan Australia. Australia berprinsip apabila negara-negara di sekitarnya aman dan sejahtera, maka Australia sendiri juga terjamin keamanan dan kesejahteraannya. Inilah mengapa fokus utama politik luar negeri Australia adalah Asia Pasifik.

## 2. Konsep Pembangunan

Kerjasama pembangunan menjadi solusi atas kekhawatiran masyarakat mengenai ketidaksetaraan gender yang masih marak terjadi. Pembangunan sendiri

berarti suatu upaya dan proses perencanaan pembangunan yang bertujuan menciptakan perubahan sebagai bagian dari proses dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan disini memiliki konsep mengenai perbaikan yang berkesinambungan dalam masyarakat untuk menuju ke arah yang lebih sejahtera dan lebih baik. Kerjasama pembangunan antara Australia dan Indonesia di ranah kesetaraan gender ini menjadi perwujudan dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs kelima yaitu kesetaraan gender, yang lengkapnya berbunyi mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Berikut adalah target-target dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan kelima dikutip dari SDGs Bappenas;

5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.

5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.

5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.

5.4 Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.

5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.

5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil tinjauan dari konferensi-konferensi tersebut.

5.a Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.

5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.

5.c Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan

yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan (Kementerian PPN, 2020a).

Dalam kerjasama pembangunan Australia-Indonesia terdapat konsep pembangunan yang fokusnya yaitu kepada pembangunan manusia. Penulis mengutip dari UNDP (*United Nations Development Programme*) dalam laporan “*Global Human Development Report*” tahun 1990 mengenai konsep Pembangunan Manusia atau *Human Development*. Pembangunan manusia dirumuskan sebagai perluasan pilihan bagi masyarakat yang dapat dilihat sebagai upaya perluasan pilihan sekaligus sebagai taraf yang akan dicapai dari upaya tersebut. Pembangunan manusia dapat juga diartikan sebagai pembangunan kemampuan manusia melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan, serta keterampilan (Rochdi, 2009). Pembangunan manusia dalam suatu wilayah dapat diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indeks yang mengukur tentang tingkat pembangunan manusia yang mana dalam hal ini diukur melalui tiga indikator yaitu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Pada beberapa bidang pembangunan, keadaan perempuan lebih rendah daripada laki-laki, begitu pula sebaliknya pada bidang pembangunan lain. Secara makro, hal ini dapat diukur menggunakan capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Nurhaeni, 2017). Baik indeks pembangunan manusia maupun pembangunan gender, sama-sama dibutuhkan untuk melihat bagaimana Indonesia bertumbuh serta upayanya untuk membangun masyarakatnya secara setara bagi perempuan ataupun laki-laki (Diba et al., 2018). Adapun indeks ketimpangan gender untuk mengukur ketimpangan gender yang terjadi pada suatu wilayah. Indeks ini menggambarkan ketimpangan gender dalam tiga dimensi. Kesehatan, reproduksi, dan yang terakhir pemberdayaan perempuan.

Bentuk-bentuk kerjasama pembangunan tergantung pada tujuan, sasaran, dan konteks dari kerjasama yang dilakukan. Beberapa bentuk kerjasama pembangunan secara umum meliputi:

- a) Bantuan Keuangan. Ini menjadi bentuk kerjasama yang paling umum, biasanya dalam bentuk hibah atau pinjaman yang diberikan kepada negara penerima untuk proyek-proyek pembangunan yang akan dilakukannya. Bantuan keuangan dapat digunakan untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, juga sektor-sektor lainnya yang mendukung pembangunan ekonomi dan sosial.
- b) Bantuan Teknis. Bantuan teknis mencakup upaya untuk meningkatkan kapasitas, memberikan pelatihan, dan mentransfer pengetahuan teknis dari

negara donor ke negara penerima. Tujuannya adalah untuk memperkuat kemampuan institusi dan individu dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi proyek-proyek pembangunan.

- c) Kemitraan Publik-Privat (PPP). PPP berarti kerjasama antara pemerintah dengan sektor swasta dalam memberikan dana, mengembangkan, dan mengoperasikan proyek-proyek pembangunan. Dalam hal ini dapat mencakup infrastruktur, pelayanan publik, dan sektor-sektor yang membutuhkan investasi jangka panjang dan efisiensi manajemen.
- d) Pemberdayaan Masyarakat. Tujuannya untuk memberdayakan masyarakat lokal dengan program-program pelatihan, pengembangan keterampilan, pemberdayaan UMKM, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan karena hal tersebut memiliki pengaruh dalam kehidupan mereka.
- e) Program Beasiswa dan Pertukaran Pendidikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesempatan akses ke pendidikan yang berkualitas serta mendukung pengembangan keterampilan dan kapasitas individu di berbagai bidang. Dalam hal ini dapat berbentuk program beasiswa, pertukaran pelajar, serta kolaborasi lembaga-lembaga pendidikan.
- f) Pengembangan Kapasitas Institusi. Bertujuan untuk menguatkan kapasitas institusi pemerintah dan non-pemerintah dalam setiap proses kegiatan pembangunan mencakup perencanaan, pengimplementasian, dan pemantauan. Pengembangan kapasitas institusi meliputi pelatihan, konsultasi teknis, dan bantuan pengembangan kebijakan.
- g) Kerjasama Riset dan Inovasi. Bertujuan untuk menghadapi tantangan pembangunan seperti perubahan iklim, kesehatan masyarakat, dan ketahanan pangan. Dalam hal ini melibatkan institusi akademis, peneliti, dan sektor swasta dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk masalah-masalah tersebut.
- h) Pendanaan Proyek Bersama. Mendanai proyek-proyek bersama yang menguntungkan kedua belah pihak, dapat berupa proyek infrastruktur, mengembangkan ekonomi lokal, serta meningkatkan ketahanan lingkungan.

#### **D. Hipotesa**

Sesuai dengan yang telah dipaparkan di atas, penulis membuat jawaban sementara kerjasama pembangunan Australia dan Indonesia dalam ranah kesetaraan gender dituangkan

dalam program-program berikut.

1. Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU) pada tahun 2013 sampai 2020
2. Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) pada tahun 2015 sampai 2022
3. Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI) pada tahun 2021 sampai dengan 2029.

### **E. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Lexy.J Moleong, penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari tulisan, lisan, maupun dokumen-dokumen dari objek yang diamati (Moleong, 2020). Dalam penelitian ini turut menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka, menurut J. Supranto dalam buku metode penelitian Public Relations dan komunikasi, studi pustaka adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui jurnal ilmiah, buku-buku referensi, dan publikasi yang tersedia di perpustakaan (Rosady, 2017).

### **F. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini mengkaji bagaimana kerjasama pembangunan Australia dengan Indonesia dalam bidang kesetaraan gender khususnya pada program MAMPU, KOMPAK, dan INKLUSI. Penulis juga akan membahas lebih dalam mengenai beberapa mitra dan output dari program-program tersebut yang keseluruhannya memiliki tujuan pokok yang sama yaitu mewujudkan keadilan sosial, kesetaraan, dan keadilan gender di ranah publik dan privat.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini mencakup empat bab yang menjelaskan topik skripsi mengenai program kemitraan Australia dan Indonesia. Kemudian terdapat sub bab-sub bab yang memperinci penjelasan dari bab besar yang ada. Hubungan antar bab di dalam skripsi ini disusun secara sistematis agar memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi, yakni:

### **Bab I : Pendahuluan**

Berisi garis besar penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, hipotesa, implementasi konsep, metode penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

## **Bab II : Dinamika Kerjasama Pembangunan Australia dan Indonesia**

Berisi awal mula terjadinya kerjasama pembangunan antara Australia dengan Indonesia, hingga terbentuknya Official Development Assistance dimana Australia menjadi negara pendonor sedangkan Indonesia menjadi negara penerima bantuan.

## **Bab III : Program Kerjasama Pembangunan Australia dan Indonesia dalam Ranah Kesetaraan Gender**

Pada bab ini penulis akan membahas terkait beberapa program kerjasama antara Australia dan Indonesia untuk meningkatkan pembangunan khususnya bagi perempuan dan mengatasi ketimpangan gender yang terjadi di Indonesia, serta output apa saja yang dihasilkan dari program-program tersebut.

## **Bab IV : Kesimpulan**

Bab ini berisi kesimpulan dan hasil penelitian yang diperoleh dari bab I sampai bab IV sekaligus menjadi bagian akhir dari skripsi ini.